

BAB II

KAJIAN TEORI

1.2 Landasan Teori

2.1.1. Pengertian Akuntansi

Menurut Komite Terminologi dari American Institute of Certified Public Accountants dalam buku (Belkoui, 2006:50) akuntansi adalah suatu seni pencatatan, pengklasifikasian, dan pengikhtisaran dalam cara yang signifikan dan satuan mata uang, transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian yang paling tidak sebagian di antaranya, memiliki sifat keuangan, dan selanjutnya menginterpretasikan hasilnya. Sebuah perspektif yang lebih luas dinyatakan dalam definisi yang menggambarkan akuntansi sebagai Proses pengidentifikasian, pengukuran, dan pengomunikasian informasi ekonomi sehingga memungkinkan adanya pertimbangan dan pengambilan keputusan berdasarkan informasi oleh para pengguna informasi tersebut.

Menurut Walter (2012) pengertian akuntansi adalah suatu sistem informasi, yang mengukur aktivitas bisnis, memproses data menjadi laporan dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pengambil keputusan yang akan membuat keputusan yang dapat mempengaruhi aktivitas bisnis”. Sedangkan menurut Warren, dkk (2014),”Akuntansi dapat diartikan sebagai sistem informasi yang menyediakan laporan untuk para pemangku kepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan” (Afif, 2021)

American Institute of Certified Public Accountants (AICPA)” dalam Harahap (2003) mendefinisikan akuntansi sebagai seni pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran dengan cara tertentu dalam ukuran moneter, transaksi, dan kejadian-kejadian yang umumnya bersifat keuangan termasuk menafsirkan hasil-hasilnya (Santi Hariyani, 2016).

Pengertian Akuntansi menurut Charles T.Horngren, dan Walter T. Harrison (2007:4) menyatakan bahwa akuntansi adalah sistem informasi yang mengukur aktivitas bisnis, memproses data menjadi laporan, dan mengkomunikasikan hasilnya kepada para pengambil keputusan.

American Accounting Association dalam Soemarso (2018:5) mendefinisikan “Akuntansi sebagai proses mengidentifikasi, mengukur dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut.”

Definisi ini mengandung beberapa pengertian, yakni: (1) Kegiatan Akuntansi, Bahwa akuntansi merupakan proses yang terdiri dari identifikasi, pengukuran, dan pelaporan informasi ekonomi. (2) Kegunaan Akuntansi, Bahwa informasi ekonomi yang dihasilkan oleh akuntansi diharapkan berguna dalam penilaian pengambilan keputusan mengenai kesatuan usaha yang bersangkutan (Leny Nofianti & Fakultas, 2012).

Menurut Fess (2016:10) secara umum, akuntansi dapat didefinisikan sebagai “Sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan. Akuntansi (accounting) menurut Horngren dan Harrison (2017:4) adalah “Sistem informasi yang mengukur aktivitas bisnis, memproses data menjadi laporan, dan mengkomunikasikan hasilnya kepada para pengambil keputusan”.

Teori Kontingensi Lawrence & Lorsch (1967) menyatakan tidak ada satu cara terbaik untuk merancang Sistem Informasi Akuntansi (SIA) atau struktur organisasi; efektivitasnya bergantung pada kesesuaian (fit) antara faktor internal (seperti ukuran, teknologi, strategi) dan faktor eksternal (lingkungan, ketidakpastian) organisasi, yang mendorong adaptasi sistem agar optimal dalam konteks spesifiknya.

Teori Gordon dan Miller (1976) tentang Sistem Informasi Akuntansi (SIA) berfokus pada Teori Kontingensi, yang menyatakan bahwa desain SIA harus disesuaikan dengan kebutuhan spesifik organisasi, dipengaruhi oleh faktor internal (kebijakan manajemen) dan eksternal (lingkungan), untuk menghasilkan informasi yang relevan bagi perencanaan, pengendalian, pengambilan keputusan,

dan evaluasi kinerja, menjadikannya bagian dari Sistem Informasi Manajemen (SIM) yang lebih luas.

Tujuan utama akuntansi menurut Soemarso (2018:5) adalah Menyajikan informasi ekonomi (economic information) dari satu kesatuan ekonomi (economic entity) kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Kesatuan ekonomi adalah badan usaha (business enterprise). Informasi ekonomi dihasilkan oleh akuntansi yang berguna bagi pihak-pihak di dalam perusahaan itu sendiri maupun pihak di luar perusahaan.

Untuk menghasilkan informasi ekonomi, perusahaan perlu menciptakan suatu metode pencatatan, penggolongan, analisa, dan pengendalian transaksi serta kegiatan-kegiatan keuangan, kemudian melaporkan hasilnya. Kegiatan akuntansi meliputi (Satria & Fatmawati, 2021):

- a. Pengidentifikasian dan pengukuran data yang relevan untuk suatu pengambilan keputusan.
- b. Pemrosesan data yang bersangkutan kemudian pelaporan informasi yang dihasilkan.
- c. Pengkomunikasian informasi kepada pemakai laporan.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa definisi akuntansi adalah suatu proses mengumpulkan, menganalisis, mengklasifikasikan, mencatat dan menyajikan informasi yang diberikan organisasi melalui laporan keuangan dengan tujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi suatu organisasi.

2.1.2. Sistem Akuntansi Keuangan

Sistem akuntansi keuangan merupakan rangkaian prosedur, formulir, catatan, dan alat yang digunakan untuk mengolah informasi keuangan sehingga menghasilkan laporan keuangan yang bermanfaat bagi berbagai pihak, baik internal maupun eksternal perusahaan (Saroji, 2021). Untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi pihak internal maupun eksternal,

disusunlah suatu sistem akuntansi yang dirancang untuk menghasilkan informasi yang relevan dan berguna bagi pengambilan keputusan.(Saroji, 2021).

Menurut Susanto (2013 p 22), “sistem adalah kumpulan atau grup dari subsistem atau bagian apa pun, baik fisik maupun nonfisik, yang saling berhubungan dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai tujuan tertentu” (Annisa Handayani et al., 2024 p 23). Senada dengan itu, V. Wiratna Sujarweni (2015) menyatakan bahwa “sistem adalah kumpulan elemen yang saling berkaitan dan bekerja sama dalam melakukan kegiatan untuk mencapai suatu tujuan”. Akuntansi sendiri merupakan proses pengidentifikasian, pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran, dan pelaporan informasi keuangan yang bertujuan untuk menghasilkan informasi yang berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan, baik internal maupun eksternal, dalam rangka pengambilan keputusan. (Annisa Handayani et al., 2024 p 13).

Lebih lanjut, menurut V. Wiratna Sujarweni (2015), sistem akuntansi terdiri dari elemen-elemen seperti formulir, jurnal, buku besar, buku pembantu, dan laporan keuangan yang digunakan oleh manajemen untuk mencapai tujuan perusahaan. Sistem akuntansi ini dimulai dari input berupa transaksi yang dicatat dalam formulir, kemudian diproses melalui penjurnalan, pembuatan buku besar, dan buku pembantu, hingga akhirnya menghasilkan output berupa laporan keuangan yang digunakan oleh manajemen.(Annisa Handayani et al., 2024 p 12).

Soemarso (2004) mendefinisikan akuntansi sebagai proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan pengambilan keputusan yang jelas bagi para pengguna informasi tersebut. Sistem akuntansi sendiri adalah metode dan prosedur untuk mencatat serta melaporkan informasi keuangan yang disediakan bagi perusahaan atau organisasi bisnis. Pada perusahaan besar, sistem akuntansi yang diterapkan biasanya sangat kompleks dan

melibatkan tiga tahapan utama (Pamungkas & Wardani Latifah, 2013 p 14):

- a. Mengenali dokumen bukti transaksi yang digunakan oleh perusahaan, baik terkait jumlah fisik, jumlah rupiah, maupun data penting lainnya yang berkaitan dengan transaksi perusahaan..
- b. Mengelompokkan dan mencatat data yang tercantum dalam dokumen bukti transaksi ke dalam catatan-catatan akuntansi.
- c. Meringkas informasi dari catatan-catatan akuntansi menjadi laporan yang dapat digunakan oleh manajemen dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem akuntansi keuangan adalah rangkaian prosedur dan metode yang digunakan untuk mengelola, mencatat, dan melaporkan transaksi keuangan suatu organisasi atau perusahaan secara sistematis dan terstruktur, sehingga menghasilkan informasi keuangan yang akurat dan dapat digunakan dalam pengambilan keputusan oleh berbagai pihak yang berkepentingan.

2.1.3. Implementasi Digitalisasi Sistem Akuntansi Keuangan

Implementasi digitalisasi sistem akuntansi keuangan sangat erat kaitannya dengan 4 (empat) prinsip good governance, yaitu: keadilan (*fairness*), transparansi (*transparency*), dapat dikontrol/tanggungjawab (*accountability*), dan tanggung jawab (*responsibility*). Digitalisasi menjadikan proses akuntansi tidak hanya tercatat secara sistematis, tetapi juga berlangsung secara real time, terdokumentasi dengan baik, dan mudah ditelusuri melalui sistem berbasis teknologi. Pada hakikatnya, akuntansi adalah proses pencatatan secara sistematis atas transaksi keuangan yang bermuara pada pelaporan untuk dimanfaatkan para pemakai informasi keuangan untuk berbagai kebutuhan. Melalui digitalisasi, proses tersebut diotomatisasi, terintegrasi, dan terdigitalisasi sehingga meminimalkan kesalahan manual, mempercepat proses pelaporan, serta memperkuat fungsi pengendalian internal. Keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab akan semakin membaik apabila didukung oleh digitalisasi sistem

akuntansi yang mampu menghasilkan informasi yang tepat waktu, akurat, dan tidak menyesatkan. Sistem akuntansi keuangan berbasis digital memungkinkan jejak audit yang jelas, akses data yang lebih terbuka bagi pihak berwenang, serta pelaporan yang sesuai standar akuntansi dan regulasi yang berlaku. Sebaliknya, sistem akuntansi yang masih manual, usang, tidak terintegrasi, tidak informatif, tidak akurat, dan berpotensi menyesatkan akan merusak sendi-sendi keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab. Keterlambatan laporan, kesalahan pencatatan, hingga peluang manipulasi data lebih besar terjadi jika sistem belum terdigitalisasi dan tidak ditopang oleh infrastruktur teknologi yang memadai..

Implementasi digitalisasi Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) merupakan proses penerapan sistem berbasis teknologi informasi yang mencakup pembaruan prosedur, pemanfaatan aplikasi dan perangkat lunak akuntansi, serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia untuk mengelola dan melaporkan informasi keuangan secara akurat, transparan, dan sesuai standar akuntansi yang berlaku. Implementasi ini meliputi tahapan perencanaan, pemilihan dan pengembangan sistem, pelatihan pengguna, uji coba, penerapan penuh (go live), hingga evaluasi dan penyempurnaan berkelanjutan agar sistem selalu relevan dengan kebutuhan organisasi dan perkembangan regulasi.(Itan & Meiviana, 2024 p 19):

a. Tahap Persiapan

Pada tahap ini dilakukan analisis kebutuhan bisnis untuk memahami secara mendalam harapan dan tujuan sistem akuntansi yang akan diimplementasikan. Identifikasi kelemahan sistem lama, perumusan tujuan baru, serta alokasi sumber daya seperti anggaran, personil, dan infrastruktur teknologi dilakukan di sini. Ini menjadi fondasi agar implementasi berjalan efektif

b. Tahap Perancangan

Merancang sistem akuntansi meliputi struktur data, arsitektur perangkat lunak, alur kerja, dan proses bisnis yang akan diintegrasikan. Desain

harus sesuai dengan kebutuhan bisnis, standar akuntansi (misalnya SAK ETAP untuk koperasi atau standar pemerintah untuk SKPD), serta regulasi yang berlaku. Rencana pelaksanaan dan jadwal juga disusun pada tahap ini (Rudianto, 2022 p 26)

c. Tahap Pengembangan dan Implementasi

Sistem dikembangkan dan diinstalasi, termasuk perangkat keras dan lunak, migrasi data dari sistem lama, serta konfigurasi sistem. Pelatihan pengguna akhir menjadi bagian penting agar mereka mampu mengoperasikan sistem dengan baik. Implementasi ini dapat menggunakan software sederhana seperti Microsoft Excel untuk koperasi atau ERP dan software khusus seperti Odoo untuk perusahaan yang lebih besar

d. Tahap pengujian dan validasi

Sistem diuji untuk memastikan fungsionalitas berjalan sesuai desain dan kebutuhan pengguna. Pengujian meliputi uji coba oleh pengguna dan penyesuaian sistem berdasarkan feedback agar efektif dan efisien

e. Tahap pemeliharaan dan evaluasi

Setelah implementasi, sistem harus dipantau dan dievaluasi secara berkala untuk memastikan keberlanjutan dan peningkatan kualitas laporan keuangan. Pelatihan berkelanjutan dan pembaruan sistem juga diperlukan untuk mengatasi perubahan kebutuhan dan teknologi

Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan di berbagai Konteks

a. Pemerintahan Daerah (SKPD)

Implementasi SAK di SKPD mengikuti standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual untuk menghasilkan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel. Setiap SKPD bertanggung jawab atas pencatatan transaksi ekonomi dan pelaporan keuangan secara tepat waktu. Penggunaan sistem terkomputerisasi dan ERP dapat meningkatkan kualitas laporan dan efisiensi proses akuntansi

b. Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi sering menghadapi keterbatasan sumber daya dan pengetahuan akuntansi. Implementasi sistem akuntansi berbasis Microsoft Excel yang mengikuti SAK ETAP dapat membantu koperasi dalam menyusun laporan keuangan yang akurat dan mudah dipahami oleh anggota. Proses ini meliputi analisis transaksi, perancangan sistem aplikasi, pengembangan prototipe, dan implementasi sistem secara komprehensif (Santoso & Kurnianingsih, 2020 p 27)

c. Perusahaan Komersial

Perusahaan menggunakan sistem informasi akuntansi yang terintegrasi untuk mengotomatisasi pencatatan transaksi, pembuatan faktur, penggajian, dan pelaporan keuangan berbasis accrual. Software seperti Odoo dipilih karena kesesuaiannya dengan standar akuntansi dan kemampuannya menghasilkan laporan keuangan lengkap dan tepat waktu

Secara keseluruhan, implementasi Sistem Akuntansi Keuangan harus dilakukan secara sistematis dan terstruktur dengan memperhatikan aspek teknis, sumber daya manusia, standar akuntansi, serta keamanan. Pendekatan ini memastikan sistem dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, mendukung pengelolaan keuangan yang efektif, dan memenuhi kebutuhan pelaporan bagi berbagai jenis organisasi (Itan & Meiviana, 2024 p 30)

2.1.4. Standar Akuntansi Keuangan

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia merupakan pedoman baku yang digunakan untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan secara konsisten dan transparan. Sejarah perkembangan SAK di Indonesia dimulai sejak tahun 1973, ketika Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) membentuk Panitia Penghimpun Bahan-Bahan dan Struktur GAAP (*Generally Accepted Accounting Principles*) serta GAAS (*Generally Accepted Auditing Standards*) sebagai langkah awal kodifikasi prinsip

akuntansi yang berlaku di Indonesia. Pada masa itu, IAI juga membentuk Komite Prinsip Akuntansi Indonesia (Komite PAI) yang bertugas menyusun standar akuntansi dengan mengacu pada US GAAP, sebagai persiapan diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia pada tahun 1974. Seiring dengan perkembangan dunia usaha, Komite PAI melakukan revisi besar pada prinsip akuntansi yang kemudian diterbitkan dalam buku Prinsip Akuntansi Indonesia (PAI) tahun 1984 dan revisi total pada tahun 1994 yang menghasilkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang lebih baku dan fleksibel dibandingkan prinsip sebelumnya. Pada tahun 1994, Komite PAI berganti nama menjadi Komite Standar Akuntansi Keuangan (Komite SAK) dan kemudian menjadi Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) yang memiliki otonomi penuh dalam menyusun dan mengesahkan PSAK (Ratnawati et al., 2023 p 29).

Sejak pertengahan 1990-an, Indonesia mulai mengadopsi standar internasional, yaitu International Financial Reporting Standards (IFRS), untuk meningkatkan kualitas dan keseragaman pelaporan keuangan di tingkat global. Proses konvergensi ini terus berlangsung hingga saat ini dengan berbagai revisi dan penyempurnaan SAK yang disesuaikan dengan perkembangan bisnis dan teknologi informasi. SAK di Indonesia kini terdiri dari beberapa jenis, termasuk SAK Umum yang digunakan oleh entitas publik, SAK Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) untuk usaha kecil dan menengah, serta SAK Syariah yang mengatur pelaporan keuangan berbasis prinsip syariah. Penerapan SAK yang konvergen dengan IFRS mulai berlaku efektif sejak 1 Januari 2015, menjadikan laporan keuangan di Indonesia lebih transparan, akuntabel, dan dapat dibandingkan secara internasional. Dengan demikian, SAK berperan penting sebagai cermin yang menggambarkan kondisi keuangan dan kinerja bisnis secara akurat dan dapat dipercaya oleh berbagai pemangku kepentingan

2.1.5. Perana Sistem Akuntansi Keuangan dalam Koperasi

Peranan sistem akuntansi keuangan dalam koperasi sangat krusial untuk menjamin pengelolaan keuangan yang efektif, transparan, dan akuntabel.

Berikut adalah beberapa peranan utama sistem akuntansi keuangan dalam koperasi (Lumintang et al., 2017 p 15):

a. Memisahkan Keuangan Pribadi dan Koperasi

Sistem akuntansi koperasi memastikan pemisahan yang jelas antara keuangan pribadi anggota dan keuangan koperasi sehingga tidak tercampur dan memudahkan pengelolaan serta pelaporan keuangan yang akurat

b. Mencatat dan Mengelola Transaksi Keuangan Secara Akurat

Setiap transaksi keuangan koperasi dicatat secara sistematis dan teratur, mencakup akuntansi kas, piutang, hutang, persediaan, dan lain-lain. Hal ini membantu dalam pengendalian pendapatan, pengeluaran, aset, dan kewajiban koperasi.

c. Menyusun Laporan Keuangan yang Informatif dan Transparan

Sistem akuntansi memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang lengkap dan transparan, yang menjadi alat pertanggungjawaban pengurus kepada anggota dan pihak eksternal seperti pemerintah, calon anggota, bank, dan kreditur

d. Memenuhi Standar Akuntansi dan Regulasi yang Berlaku

Koperasi wajib mematuhi standar akuntansi khusus seperti Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dan peraturan pemerintah terkait, serta melakukan audit keuangan secara rutin untuk memastikan kepatuhan dan keandalan laporan keuangan

e. Meningkatkan Akuntabilitas dan Kepercayaan Anggota

Dengan sistem akuntansi yang baik, koperasi dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan, sehingga membangun kepercayaan anggota dan pemangku kepentingan lainnya terhadap koperasi

f. Mendukung Pengambilan Keputusan Manajemen

Informasi keuangan yang dihasilkan oleh sistem akuntansi membantu pengurus koperasi dalam membuat keputusan yang tepat terkait

pengelolaan keuangan, pengendalian anggaran, dan perencanaan usaha koperasi

g. Mengadopsi Teknologi untuk Efisiensi dan Akurasi

Penggunaan sistem akuntansi berbasis teknologi informasi membantu koperasi dalam mengelola transaksi, pembukuan, penggajian, dan penyusunan laporan keuangan secara lebih efisien dan akurat.

h. Menjadi Dasar Evaluasi Kinerja dan Pertanggungjawaban

Laporan keuangan yang dihasilkan menjadi alat utama bagi anggota dan pemerintah untuk menilai pertanggungjawaban pengurus, prestasi kerja, manfaat yang diberikan koperasi, serta sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan terkait sumber daya koperasi.

Secara keseluruhan, sistem akuntansi keuangan dalam koperasi berperan sebagai fondasi pengelolaan keuangan yang terorganisir, transparan, dan sesuai dengan regulasi, yang pada akhirnya mendukung keberlanjutan dan perkembangan koperasi

2.1.6. Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Organisasi

Pengelolaan keuangan memiliki peranan sentral dalam kinerja organisasi koperasi karena berpengaruh langsung terhadap keberlangsungan, transparansi, dan efektivitas operasional koperasi. Berikut penjelasan mengenai hubungan pengelolaan keuangan dan kinerja organisasi koperasi (Aloysius Theofilus Indrianto Max Pare et al., 2023 p 28):

a. Perencanaan Keuangan yang Terstruktur

Koperasi perlu menyusun rencana anggaran pendapatan dan biaya (APB) yang jelas dan realistis untuk periode tertentu. APB berfungsi sebagai alat pengendalian keuangan yang membantu koperasi mengukur kinerja keuangan secara objektif dan menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan

b. Pengorganisasian dan Pengendalian Keuangan

Manajemen keuangan koperasi mencakup pengorganisasian tugas dan tanggung jawab terkait keuangan, termasuk pengelolaan kas, investasi, dan pinjaman. Pengendalian internal yang efektif diperlukan untuk memastikan penggunaan dana sesuai dengan rencana dan mencegah penyalahgunaan.

c. Pelaporan dan Transparansi Keuangan

Penyusunan laporan keuangan yang akurat dan teratur seperti neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas sangat penting untuk memberikan informasi transparan kepada anggota dan pemangku kepentingan. Transparansi ini meningkatkan akuntabilitas pengurus dan kepercayaan anggota terhadap koperasi (Rudy Rahwana, 2023 p 28).

d. Pengawasan dan Audit

Pengawasan internal dan audit eksternal secara berkala membantu mendeteksi kesalahan atau penyimpangan dalam pengelolaan keuangan. Pengawasan anggota sebagai pemilik koperasi juga menjadi mekanisme kontrol yang efektif untuk menjaga kinerja organisasi.

e. Mendukung Pengambilan Keputusan dan Kemandirian Koperasi

Informasi keuangan yang dikelola dengan baik menjadi dasar bagi pengurus dalam mengambil keputusan strategis yang mendukung pengembangan usaha koperasi dan pemberdayaan ekonomi anggota. Manajemen keuangan yang profesional dan terencana meningkatkan kemandirian koperasi dan kesejahteraan anggota.

f. Meningkatkan Kinerja Organisasi secara Keseluruhan

Pengelolaan keuangan yang baik memungkinkan koperasi menjalankan aktivitas usahanya secara efisien, mengoptimalkan sumber daya, dan meminimalkan risiko keuangan. Hal ini berdampak positif pada kinerja organisasi, termasuk pencapaian tujuan koperasi dan distribusi sisa hasil usaha yang adil (Purwantini, S.Kom., M.Si, 2016 p 28).

Oleh karena itu Pengelolaan keuangan yang efektif dan transparan adalah fondasi utama bagi kinerja organisasi koperasi. Melalui perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, pelaporan, dan pengawasan keuangan yang baik, koperasi dapat meningkatkan akuntabilitas, menjaga kepercayaan anggota, serta mendukung pengambilan keputusan yang tepat. Dengan demikian, pengelolaan keuangan yang profesional berkontribusi langsung pada keberhasilan dan keberlanjutan koperasi sebagai organisasi ekonomi yang memberdayakan anggotanya.

2.1.7. Faktor – Faktor yang mempengaruhi Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan

Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi sistem akuntansi keuangan meliputi beberapa aspek penting sebagai berikut (Wulandary et al., 2022 p 71):

a. Sumber Daya Manusia (SDM) dan Pendidikan

Sumber daya manusia merupakan aset utama dalam keberhasilan implementasi sistem akuntansi. Tingkat pendidikan dan pelatihan yang memadai sangat menentukan kemampuan staf keuangan dalam mengoperasikan sistem akuntansi secara efektif dan efisien. SDM yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi dan pelatihan teknis yang berkelanjutan akan lebih siap menghadapi tantangan dalam pengelolaan data keuangan yang kompleks. Selain itu, pengembangan karakter seperti disiplin, etos kerja, dan sikap profesionalisme sangat penting agar staf dapat menjadi teladan dalam menjalankan tugasnya dan menjaga integritas laporan keuangan. Pemimpin yang mampu menanamkan nilai-nilai tersebut akan menciptakan budaya kerja yang mendukung keberhasilan sistem akuntansi. Pelatihan berkelanjutan dan pembinaan kompetensi juga harus menjadi prioritas agar SDM dapat mengikuti perkembangan teknologi dan regulasi yang dinamis

b. Fasilitas dan Teknologi Informasi

Kemajuan teknologi informasi merupakan faktor kunci dalam modernisasi sistem akuntansi. Ketersediaan perangkat keras dan

perangkat lunak yang memadai memungkinkan pengolahan data keuangan secara otomatis, cepat, dan akurat. Sistem informasi akuntansi yang terintegrasi dapat meminimalisasi kesalahan manusia, mempercepat proses pelaporan, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, teknologi informasi juga mendukung pengelolaan data dalam jumlah besar dan kompleks, yang sulit diolah secara manual. Investasi dalam infrastruktur TI yang handal dan keamanan data yang ketat juga sangat penting untuk menjaga kerahasiaan dan keandalan informasi keuangan. Fasilitas pendukung seperti jaringan internet yang stabil dan pusat data yang memadai menjadi prasyarat agar sistem dapat berjalan optimal.

c. Sistem Aturan dan Regulasi

Sistem akuntansi harus dibangun berdasarkan kerangka aturan yang jelas dan sesuai dengan standar yang berlaku. Kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) atau prinsip akuntansi umum merupakan fondasi agar laporan keuangan dapat dipercaya dan diterima oleh berbagai pihak. Regulasi yang ketat mengatur tata cara pencatatan, pelaporan, dan audit keuangan sehingga meminimalisasi risiko penyimpangan dan fraud. Selain itu, sistem hukum dan peraturan perpajakan juga memengaruhi desain dan pelaksanaan sistem akuntansi, terutama dalam hal pelaporan pajak dan kewajiban fiskal. Lingkungan regulasi yang stabil dan konsisten memberikan kepastian hukum bagi organisasi dalam menjalankan aktivitas keuangan mereka.

d. Komunikasi dan struktur Birokrasi

Komunikasi yang efektif antar unit kerja terkait sangat menentukan kelancaran implementasi sistem akuntansi. Struktur birokrasi yang jelas dan mendukung memudahkan koordinasi, pengawasan, dan pengambilan keputusan. di lingkungan pemerintahan, birokrasi yang transparan dan responsif akan mempercepat adaptasi sistem baru serta mengatasi hambatan yang muncul selama proses implementasi. Komunikasi yang baik juga mencakup penyampaian informasi yang

jelas dan formal, sehingga seluruh pihak memahami peran dan tanggung jawabnya dalam sistem akuntansi. Hal ini penting untuk menghindari miskomunikasi yang dapat menyebabkan kesalahan pencatatan atau pelaporan.

e. Kesadaran dan Disposisi Pengguna

Pengguna sistem akuntansi, mulai dari manajemen puncak hingga staf operasional, harus memiliki kesadaran yang tinggi akan pentingnya sistem tersebut dalam mendukung pengambilan keputusan dan transparansi keuangan. Sikap positif dan dukungan penuh dari para pemilik dan manajer organisasi sangat menentukan keberhasilan penerapan sistem. Budaya organisasi yang mendorong inovasi, keterbukaan, dan pengembangan berkelanjutan akan memperkuat komitmen pengguna terhadap sistem. Selain itu, kepemimpinan yang visioner dan mampu menginspirasi perubahan akan mempercepat adaptasi dan pemanfaatan teknologi serta prosedur baru dalam sistem akuntansi.

f. Dukungan Eksternal dan Aksesibilitas Sumber Daya

Dukungan dari pihak eksternal seperti pemerintah, lembaga keuangan, konsultan akuntansi, dan penyedia teknologi sangat membantu organisasi dalam mengimplementasikan sistem akuntansi. Bentuk dukungan dapat berupa pelatihan teknis, pendampingan selama proses implementasi, serta penyediaan akses terhadap teknologi dan sumber daya yang diperlukan. Kolaborasi dengan pihak eksternal juga membuka peluang untuk memperoleh best practice dan solusi inovatif yang dapat meningkatkan kualitas sistem. Ketersediaan akses sumber daya ini sangat penting terutama bagi organisasi yang masih dalam tahap pengembangan sistem atau memiliki keterbatasan internal.

g. Lingkungan Bisnis dan Tekanan Ekonomi

Kondisi lingkungan bisnis yang kompetitif dan tekanan ekonomi yang meningkat memaksa organisasi untuk mengoptimalkan sistem

akuntansi mereka agar dapat menghasilkan laporan keuangan yang akurat, tepat waktu, dan relevan. Tekanan untuk mencapai kinerja keuangan yang baik mendorong organisasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan melalui sistem akuntansi yang handal. Selain itu, dinamika pasar dan perubahan regulasi ekonomi menuntut sistem akuntansi yang fleksibel dan adaptif agar da

Secara ringkas, faktor-faktor tersebut dapat dikategorikan dalam aspek sumber daya manusia, teknologi dan fasilitas, regulasi dan sistem aturan, komunikasi dan birokrasi, kesadaran dan budaya organisasi, dukungan eksternal, serta lingkungan bisnis dan ekonomi. Memahami dan mengelola faktor-faktor ini secara holistik akan meningkatkan keberhasilan implementasi sistem akuntansi keuangan

2.1.8. Indikator Sistem Akuntansi Keuangan

Sistem akuntansi pemerintahan daerah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 232 Ayat (3) yang menjelaskan sistem akuntansi daerah meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggung jawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi computer (Wulandary et al., 2022 p 42).

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 pasal 233 ayat (1) sistem akuntansi pemerintahan daerah sekurang-kurangnya meliputi: prosedur akuntansi penerimaan kas, prosedur pengeluaran kas, prosedur akuntansi aset tetap/barang milik daerah, dan prosedur akuntansi selain kas.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 menetapkan elemen-elemen dan indkator sistem akuntansi keuangan daerah sebagai berikut (Andriansyah & Nurhasanah, 2020 p 28) :

- a. Transaksi

Transaksi merupakan bagian yang merubah posisi keuangan suatu entitas dan pencatatannya memerlukan data, dokumen, atau bukti pendukung dalam kegiatan operasi entitas. Transaksi dilakukan oleh masing-masing kas bendahara.

b. Jurnal

Buku jurnal adalah media untuk mencatat transaksi secara kronologi (urut waktu) yang digunakan untuk mencatat, mengklarifikasikan, dan meringkas data keuangan dan data lainnya.

c. Buku Besar

Buku besar merupakan suatu buku yang berisi kesimpulan rekening atau perkiraan yang telah dicatat didalam jurnal. Rekening-rekening tersebut digunakan untuk mencatat secara terpisah aktiva, kewajiban, hutang, dan ekuitas.

d. Neraca Saldo

Neraca saldo merupakan daftar rekening-rekening beserta saldo yang mempertanyai pada suatu periode tertentu.

e. Jurnal Penyesuaian

Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode anggaran atau pada saat laporan keuangan disusun agar menghasilkan keterkaitan yang tepat antara pendapatan dan belanja/biaya. Penyesuaian dibutuhkan ketika transaksi-transaksi mempengaruhi pendapatan dan belanja/biaya lebih dari satu periode anggaran. Penyesuaian ini mengakui pendapatan dalam periode dimana pendapatan tersebut terhimpun, dan belanja/biaya dalam periode dimana barang dan jasa berkaitan digunakan. Sebuah penyusunan akan selalu melibatkan sebuah rekening atau sebuah rekening belanja/biaya dan sebuah rekening aktiva atau rekening hutang/kewajiban.

f. Laporan Keuangan

g. Jurnal Penutup

Jurnal penutup dilakukan setelah laporan keuangan disusun.

Biasanya dilakukan pada akhir periode anggaran tahunan.

Berdasarkan elemen sistem akuntansi keuangan daerah tersebut, maka dapat disusun indikator sistem akuntansi keuangan daerah yaitu jumlah item pertanyaan adalah 8 item sebagai berikut :

- a. Kesesuaian sistem dengan SAP;
- b. Pengidentifikasian transaksi;
- c. Pencatatan transaksi;
- d. Bukti disetiap transaksi;
- e. Pencatatan kronologis;
- f. Pengklasifikasian transaksi;
- g. Laporan keuangan setiap periode;
- h. Pelaporan yang konsisten dan periode.

2.2.Kerangka Pemikiran

Sistem akuntansi keuangan merupakan suatu rangkaian prosedur yang terorganisasi untuk mengumpulkan, mencatat, mengelompokkan, dan melaporkan transaksi keuangan secara sistematis sehingga menghasilkan informasi keuangan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam konteks koperasi, sistem ini tidak hanya berfungsi sebagai alat pencatatan, tetapi juga sebagai sarana transparansi dan akuntabilitas kepada anggota dan pengurus koperasi yang memiliki tujuan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, implementasi sistem akuntansi keuangan di Koperasi KPN Tuah Sepakat harus mengacu pada standar akuntansi yang berlaku, seperti Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) atau pedoman akuntansi khusus koperasi yang diterbitkan oleh pemerintah, agar laporan keuangan yang dihasilkan dapat dipercaya dan memenuhi ketentuan yang berlaku.

Keberhasilan implementasi sistem akuntansi di koperasi sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor penting. Pertama, sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dan memiliki pelatihan memadai dalam bidang akuntansi sangat menentukan efektivitas pencatatan dan pengelolaan keuangan.

Kedua, pemanfaatan teknologi informasi yang memadai dapat meningkatkan efisiensi, kecepatan, dan akurasi proses pencatatan serta pelaporan keuangan. Ketiga, kepatuhan terhadap regulasi dan standar akuntansi yang berlaku menjadi landasan hukum dan teknis dalam penyusunan laporan keuangan koperasi. Selain itu, dukungan manajemen dan struktur organisasi yang kondusif sangat penting untuk memastikan kelancaran pelaksanaan sistem akuntansi. Faktor lingkungan eksternal, seperti dukungan pemerintah, lembaga keuangan, dan konsultan akuntansi juga berperan dalam mempercepat proses implementasi dan meningkatkan kualitas sistem akuntansi yang diterapkan.

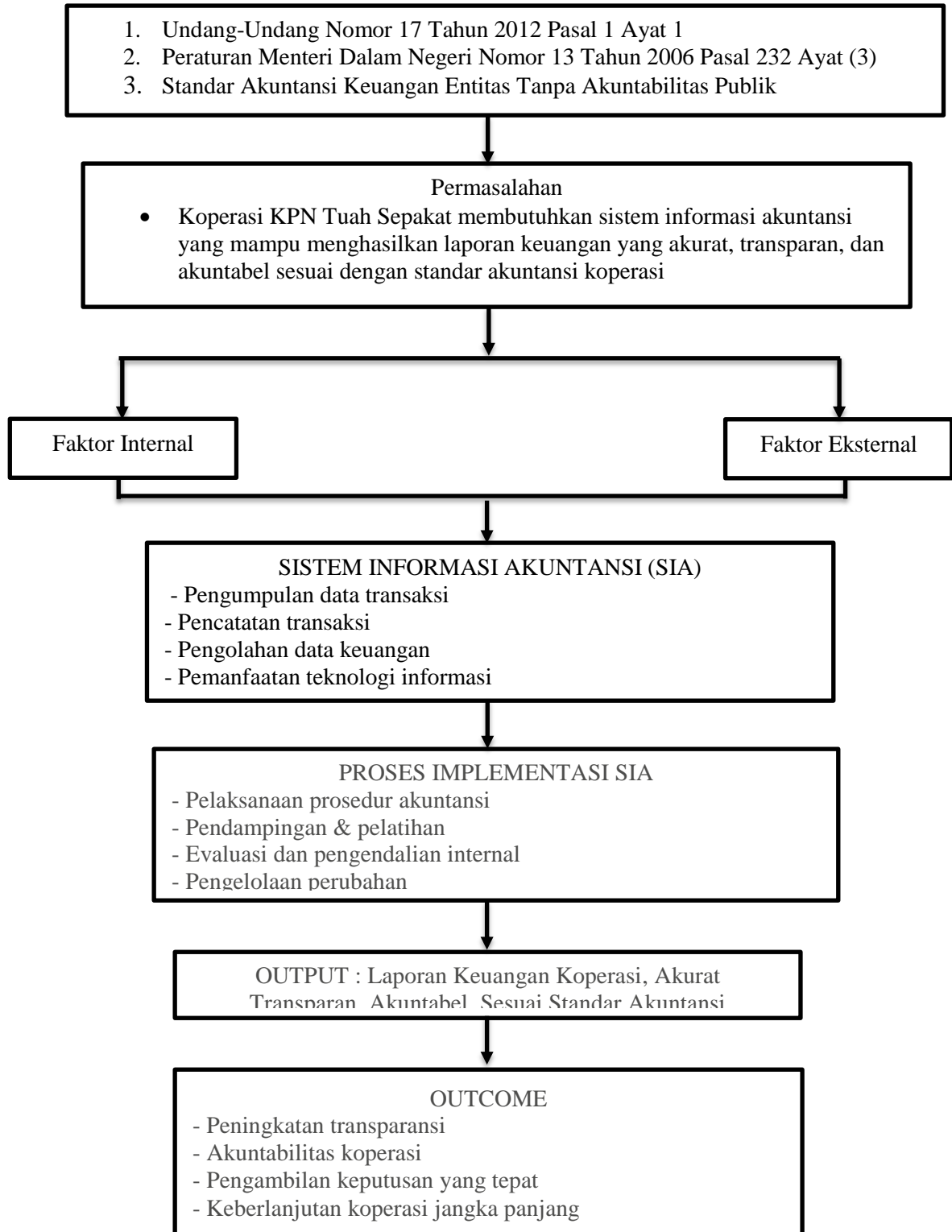
Proses implementasi sistem akuntansi di Koperasi KPN Tuah Sepakat meliputi pengumpulan data transaksi, pencatatan, pengolahan, hingga penyusunan laporan keuangan secara partisipatif yang melibatkan anggota dan pengurus koperasi. Pendampingan dan pelatihan menjadi bagian penting agar seluruh pihak memahami prosedur dan standar yang diterapkan sehingga data yang dicatat valid dan laporan yang dihasilkan transparan. Manfaat utama dari penerapan sistem akuntansi yang baik adalah peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan pengambilan keputusan yang berbasis data keuangan yang valid. Namun, dalam pelaksanaannya koperasi sering menghadapi tantangan seperti resistensi terhadap perubahan, keterbatasan kompetensi SDM, dan keterbatasan infrastruktur teknologi. Oleh karena itu, strategi pengelolaan perubahan dan peningkatan kapasitas SDM harus menjadi fokus utama agar implementasi sistem akuntansi dapat berjalan dengan sukses.

Evaluasi secara berkala terhadap sistem akuntansi yang diterapkan sangat diperlukan untuk mengidentifikasi kekurangan dan melakukan perbaikan yang berkelanjutan. Pengembangan sistem yang adaptif terhadap perubahan regulasi dan kebutuhan bisnis koperasi akan mendukung keberlanjutan koperasi dalam jangka panjang. Dengan demikian, analisis implementasi sistem akuntansi keuangan harus mempertimbangkan faktor-faktor internal dan eksternal yang memengaruhi proses tersebut, agar sistem yang diterapkan dapat memberikan manfaat optimal bagi koperasi dan anggotanya.

Tabel 2.1

KERANGKA BERFIKIR

SISTEM INFORMASI AKUNTANSI KOPERASI KPN TUAH SEPAKAT



2.3. Penelitian Relevan

No.	Peneliti & Tahun	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Metode & Sampel	Variabel Penelitian	Teknik Analisis	Hasil Penelitian
	Gyshella Smylie Lumintang (2017)	Analisis Pengaruh Sistem Pengendalian Intern dan Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Mengetahui pengaruh SPI dan SAKD terhadap kualitas laporan keuangan Pemda Kota Manado	Kuantitatif; 40 pegawai pengelola keuangan dari 10 SKPD	Variabel bebas: Sistem Pengendalian Intern, SAKD Variabel terikat: Kualitas Laporan Keuangan	Regresi Linier Berganda (SPSS 23.0)	SPI berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, sedangkan SAKD tidak berpengaruh signifikan secara parsial. Secara simultan SPI dan SAKD berpengaruh positif signifikan

	Sari, dkk. (2018)	Analisis Implementasi Sistem Informasi Akuntansi pada Koperasi Unit Desa (KUD) di Jawa Tengah	Mengidentifikasi efektivitas implementasi SIA dalam mendukung pengelolaan transaksi dan laporan keuangan koperasi	Kualitatif deskriptif; 35 pengurus dan karyawan dari 8 KUD	Variabel utama: Implementasi SAK (input, proses, output) Variabel terikat: Efektivitas pengelolaan keuangan koperasi	Analisis tematik dan triangulasi sumber	Implementasi SAK berpengaruh positif signifikan terhadap akurasi laporan keuangan dan meningkatkan transparansi keuangan koperasi hingga 75%, meskipun masih terdapat kendala adopsi software akuntansi
	Dito Aditia Darma Nasution (2019)	Analisis Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Utara	Menilai tingkat penerapan SAKD pada instansi pemerintah daerah	Deskriptif kuantitatif; 40 responden (sensus)	Variabel tunggal: Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	Uji One Sample t-Test	Penerapan SAKD belum optimal dan masih perlu peningkatan dalam pelaksanaannya
	Pratama (2020)	Evaluasi Sistem Akuntansi Keuangan pada Koperasi	Mengevaluasi kelemahan dan potensi perbaikan SAK	Mixed methods; 50 pengurus dari 12 KPN	Variabel bebas: Implementasi sistem akuntansi Variabel	Regresi Linier Sederhana (SPSS 25)	Implementasi sistem akuntansi berpengaruh positif signifikan terhadap

		Pegawai Negeri di Sumatera Barat	dalam meningkatkan pengendalian internal koperasi		terikat: Pengendalian internal dan kepatuhan standar akuntansi koperasi		pengendalian internal, namun belum signifikan pada audit eksternal akibat dominasi pencatatan manual
--	--	----------------------------------	---	--	--	--	--